

# Mari Menjual Borobudur

**BOROBUDUR** International Festival (BIF) akhirnya berlangsung juga. Beberapa catatan menarik menyertai even ini, di antaranya yang perlu dikomentari dalam catatan ini adalah keprihatinan beberapa kalangan pekerja budaya soal tidak terangkainya kesenian tradisional di wilayah persekitaran Borobudur sendiri. BIF memang cenderung hanya akan meminjam nama dan tempat Borobudur sebagai sebuah ajang menggelembungkan pendapatan di sektor pariwisata tanpa disertai visi dan misi kultural yang dapat dipertanggungjawabkan.

Simulasi politik dan ekonomi di dalamnya mewajarkan munculnya "korban pembangunan" (ala Orde Baru). Beberapa seniman atau budayawan yang menggelar acara tandingan adalah salah satu dari korban itu. Masih untung mereka masih mampu berbicara, bahkan membikin gerakan tandingan. Korban-korban yang lebih besar tentunya mereka yang sama sekali tak mampu atau tak mau berbicara, sebuah *silent native culture*.

Orang-orang yang tidak berbicara inilah orang-orang yang tulus sebagai penegak budaya (bukan semata pekerja budaya: yang bekerja mengatasmakan budaya). Mereka yang demikian, di mana pun, selalu tersingkirkan dan "dimakan" oleh simulasi politik atau ekonomi.

Memang, barangkali bukan sebuah keharusan juga jika peristiwa yang memakai nama atau tempat Borobudur untuk mengangkat tradisi kesenian di wilayah persekitarannya. Borobudur sendiri adalah sebuah artefak ajaib milik dunia, bukan milik penduduk yang kebetulan mukim di persekitarannya.

Konon, penemuan dan penempatan kembali Borobudur sendiri yang melakukan adalah Pemerintah Kolonial Belanda. Sebelum itu, candi yang diperkirakan peninggalan dari Abad VIII ini telah tertimbun tanah dan dalam kondisi tercerai-berai. Pemerintah Kolonial Belanda yang kemudian melakukan pengerukan dan penyusunan dan penempatannya kembali (dengan menggeser posisinya ke tempat yang diperkirakan secara geografis dan astronomis lebih *save*).

Sampai sekarang pun, dana pemeliharaan Borobudur adalah ditanggung oleh Bank Dunia. Jadilah, candi ini ditemukan dan disusun kembali oleh bukan Pemerintah Indonesia dan dipelihara (didanai pemeliharaannya) juga oleh bukan Pemerintah Indonesia apalagi penduduk persekitaran. Lalu, jika demikian, adakah keterhubungan langsung antara Borobudur dengan kesenian persekitarannya?

Karena itu, klaim dari mereka yang merasa sebagai pengusung tradisi kesenian Borobudur sebetulnya memang agak lemah. Apalagi, beberapa dari pengusung gerakan ini toh juga bukan orang-orang yang murni penduduk Borobudur.

Namun, gerakan semacam ini diperlukan juga sebagai pengimbang dari simulasi politik ekonomi yang lebih besar yang dilakukan oleh pemain yang "memiliki kekuatan". Akhirnya, kedua kelompok ini bertarung di sebuah panggung budaya bernama "simulasi memperjualbelikan Borobudur". Yang satu berdagang dengan kemasan visi dan misi profan industri kepariwisataan dan "laba besar" yang satu berdagang dan mengemas tema sakralisasi potensi lokal.

Siapa pemenangnya bisa dengan sangat mudah ditebak. Yang lebih sulit adalah mencari siapa yang sesungguhnya telah dikalahkan. Pihak yang sesungguhnya telah dikalahkan adalah pihak yang tidak terlibat dalam simulasi: mereka tidak tampak, mereka diam, merekalah *silent native culture*.

Merekalah yang bekerja tanpa harus berkata. Secara tidak langsung mereka mungkin menegakkan identitas Borobudur (jika Borobudur yang "milik dunia" dan dibiayai Bank Dunia ini memang harus diberi identitas lokal) tanpa pretensi dan tanpa berkoar bahwa merekalah yang pantas mengatasmakan pengusung identitas Borobudur.

Pada intinya, jika dikaitkan dengan panggung budaya berjudul "simulasi memperjualbelikan Borobudur" tadi, maka mereka yang sesungguhnya telah dikalahkan adalah mereka yang sesungguhnya tidak pernah ingin memperjualbelikan Borobudur, dengan kemasan apa pun! □-m

\*) *Amien Wangsitalaja, Penyair.*